

Newsletter

Edisi ke-5 | Februari 2021

Memupuk Asa
di tengah Pandemi

Membekali Staf
Lapas Perempuan
dengan Pengetahuan
Inklusif Gender

Menilai Kesiapsiagaan
dan Kapasitas
Tanggapan Pandemi
COVID-19

Berbagi Praktik Baik dan
Membuka Kesempatan
bagi Penyandang
Disabilitas

Laporan: Mendukung
Usaha Mikro dan Kecil
Milik Perempuan dalam
Mengatasi COVID-19
melalui Digitalisasi



©Yayasan LemINA/2020/Fitriana Arsjad

PESAN DARI KEPALA PERWAKILAN PBB



Pandemi COVID-19 kerap mencerminkan ketidaksetaraan di antara dan di dalam negara, dan berdampak buruk bagi negara-negara termasuk Indonesia dan kelompok-kelompok yang sudah berisiko tertinggal. Saat ini, kita berada pada titik kritis di mana kemanusiaan dan solidaritas global sedang diuji, di mana upaya kolektif dibutuhkan lebih dari sebelumnya untuk memastikan upaya pemulihan lebih baik dari pandemi tidak meninggalkan seorang pun.

Jadi, apa artinya tidak meninggalkan seorang pun? Secara sederhana, tidak meninggalkan seorang pun berarti memprioritaskan martabat manusia dan menempatkan kemajuan komunitas yang paling terpinggirkan terlebih dahulu – perempuan dan anak perempuan terlalu sering berada di urutan komunitas ini. Tidak meninggalkan seorang pun berarti – sebuah komitmen semua Negara Anggota PBB untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya; mengakhiri diskriminasi dan eksklusi; dan untuk bertindak secara eksplisit untuk memastikan bahwa mereka yang tertinggal dapat mengejar mereka yang telah mengalami kemajuan yang lebih besar.

Di Indonesia, sektor pekerjaan informal sangat terpengaruh oleh pandemi hampir 90 persen (atau bahkan lebih) dari semua pekerja, termasuk penyandang disabilitas yang cenderung bekerja di ekonomi informal. Tim PBB di Indonesia bekerja keras untuk memastikan bahwa kelompok rentan ini tidak tertinggal saat kita semua berusaha pulih dan bangkit dari pandemi. Sebagai contoh, kami bergabung dengan mitra-mitra kami untuk mengumpulkan sekitar 100 perusahaan dan lembaga terkait untuk mempromosikan peluang kerja yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas; untuk memberikan akses yang lebih besar ke pekerjaan formal bagi para penyandang disabilitas.

Tidak meninggalkan seorang pun adalah tujuan yang menyeluruh dan berkala dari Agenda 2030 dan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Tujuan ini mendorong kita untuk mengatasi penyebab-penyebab struktural dari ketidaksetaraan dan marginalisasi yang memengaruhi beragam lapisan masyarakat. Walaupun terdengar sulit, tidak meninggalkan seorang pun membutuhkan upaya kolektif kita bersama untuk menjalankan konsep ini. Bergabunglah dengan kami dalam menjalankan janji ambisius ini sehingga kita bersama dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mempercepat kemajuan di antara mereka yang paling tertinggal.

Valerie Julliard

UN Resident Coordinator in Indonesia



© Yayasan Lemina/2020, Fitriana Ajiad

Memupuk Asa di tengah Pandemi

Sejak pandemi, tanggung jawab kader kesehatan bertambah. Mereka kini ditugaskan untuk memastikan warga menerima informasi yang tepat terkait COVID-19 serta tahu cara-cara dan pencegahan penularan. Untuk mendukung para kader, UNICEF Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, mengadakan pelatihan yang diikuti 321 kader dari seluruh provinsi. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Yayasan

Lemina pada Juli 2020. Dari pelatihan ini, para kader kesehatan belajar cara sosialisasi COVID-19 dan peran kader kesehatan dalam mencegah wabah. Mereka juga diberikan informasi terbaru tentang COVID-19 untuk memastikan ia selalu memberikan kabar yang aktual dan akurat kepada warga setempat. Baca cerita lengkapnya: <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/memupuk-asa-di-tengah-pandemi>



©UNDP

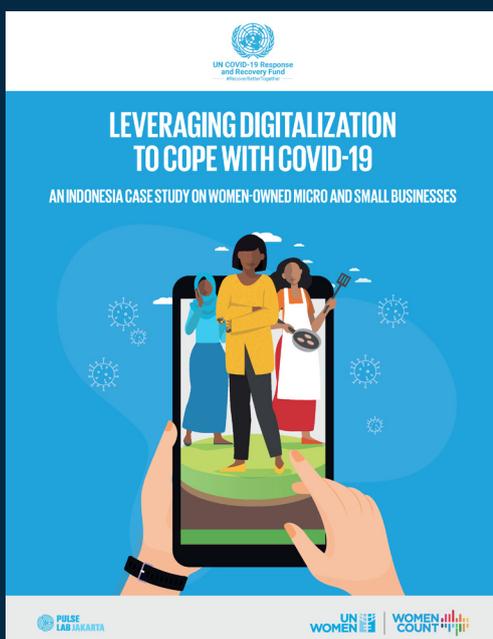
Memperkuat Sistem Rantai Pasokan Vaksin COVID-19 dengan Akses Informasi *Real-Time*

Berita kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia telah membuka jalan bagi solusi yang belum pernah ada sebelumnya dalam desain teknologi untuk mengirimkan botol vaksin ke seluruh negeri. Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Secara Elektronik (SMILE) dari Program Pembangunan Perserikatang Bangsa-Bangsa (UNDP), sebuah solusi teknologi inovatif yang

bertujuan untuk memperkuat sistem rantai pasokan imunisasi Indonesia, dilibatkan untuk memastikan pengiriman vaksin di seluruh nusantara. Menyusul penggunaan SMILE untuk imunisasi rutin dan mendukung penuh vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan telah melakukan pelatihan penerapan SMILE untuk hampir 10.000 penangan rantai dingin vaksin di 34 provinsi

di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memberikan informasi penting yang mendukung rantai pasokan kesehatan Indonesia dan memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal saat negara berupaya melindungi warganya selama pandemi. Untuk lebih lanjut: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2020/Smile-Vaccine.html>

Laporan: Mendukung Usaha Mikro dan Kecil Milik Perempuan dalam Mengatasi COVID-19 melalui Digitalisasi



Digitalisasi dan penggunaan teknologi telah membantu bisnis, khususnya pengusaha perempuan yang memiliki usaha mikro dan kecil (MSB) untuk bertahan dari penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, menurut laporan baru dari UN Women yang bekerja sama dengan Pulse Lab Jakarta dan Gojek, dengan dukungan Dewan Nasional Keuangan Inklusif Indonesia (S-DNKI).

Dengan dukungan dari United Nations (PBB) COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (COVID-19 MPTF) dan inisiatif UN Women's Women Count, laporan "Memanfaatkan Digitalisasi untuk Mengatasi COVID-19" mengkaji perbedaan gender dalam hasil dan strategi penanggulangan yang digunakan oleh MSB milik perempuan dan laki-laki dalam menanggapi pandemi, dengan memberikan perhatian khusus pada penggunaan wadah digital sebagai mekanisme bertahan hidup. Akses laporannya di sini: <https://data.unwomen.org/publications/leveraging-digitalization-indonesia-case-study>



Membekali Staf Lapas Perempuan dengan Pengetahuan Inklusif Gender

Narapidana perempuan memiliki tantangan khusus yang perlu ditangani dengan cara tertentu, khususnya melalui penyertaan dimensi gender untuk penanganan mereka. Atas pertimbangan tersebut, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan Thailand Institute of Justice (TIJ) telah menyelesaikan program pelatihan khusus untuk staf di Lapas Perempuan Malang pada November 2020. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kapasitas staf di implementasi "Aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan Wanita dan Tindakan Non-penahanan untuk Pelanggar Perempuan" (Aturan-aturan Bangkok/ Bangkok Rules) dan "Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan" (Aturan-aturan Mandela/ Mandela Rules). Program pelatihan disesuaikan Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan awal tahun ini melalui misi pelingkupan bersama UNODC dan TIJ ke Lapas Malang.

Para ahli dan pembicara dari UNODC, TIJ, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DGC), Second Chance Foundation pada pelatihan tersebut berfokus pada tiga aspek terpenting dalam pengelolaan penjara dan penyediaan layanan bagi narapidana perempuan: keamanan, reintegrasi dan rehabilitasi, dan kesehatan. Pelatihan ini juga membangun keterampilan staf dalam pemecahan masalah pengelolaan penjara yang peka gender diikuti dengan rencana aksi oleh staf Lapas Malang, menyoroti solusi inovatif untuk kebutuhan khusus narapidana perempuan sambil juga menghormati Bangkok Rules dan Mandela Rules. Untuk informasi lebih lanjut, baca di sini: <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/indonesia/2020/11/tij-training/story.html>

Mengakhiri Pemotongan/Perlakuan Genitalia Perempuan dan Keterlibatan Masyarakat

Pemotongan/Perlakuan Genitalia Perempuan (FGM/C) telah dilakukan dan diteruskan secara turun temurun di beberapa komunitas di Indonesia. Kegiatan gabungan bersama Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dengan UNICEF, proyek Better Sexual and Reproductive Health and Rights for All in Indonesia (BERANI) yang didanai oleh Global Affairs Canada, telah mendukung Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perlindungan dalam menangani masalah ini melalui pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Dengan advokasi oleh anggota masyarakat dan pemuka agama, serta upaya multisektoral di seluruh negeri, mengakhiri praktik berbahaya bukan hanya mimpi belaka. Baca lebih lanjut: <https://indonesia.unfpa.org/en/news/ending-fgmc-through-education-and-community-engagement>





Menilai Kesiapsiagaan dan Kapasitas Tanggapan Pandemi COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mendukung Kementerian Kesehatan untuk melakukan asesmen lapangan di 211 lokasi di seluruh Indonesia mulai 4 September hingga 9 Oktober 2020. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kesiapsiagaan COVID-19 di lima belas provinsi berdasarkan status risiko pandemiknya. Hasil penilaian lapangan akan digunakan untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan utama tentang kekuatan dan kesenjangan di setiap

provinsi dalam menanggapi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Selain itu, hasil kegiatan ini akan berguna untuk mempersiapkan negara menghadapi wabah di masa depan. WHO siap untuk mendukung Kementerian Kesehatan dalam melakukan penilaian lapangan secara teratur untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat di tingkat nasional dan sub-nasional. Informasi lebih lanjut: <https://www.who.int/indonesia/news/detail/11-12-2020-field-assessment-of-covid-19-pandemic-preparedness-and-response-capacity-in-15-provinces>

Berbagi Praktik Baik dan Membuka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas



Sebagai bagian dari revitalisasi Jaringan Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI), Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), bekerja sama dengan Difalink, mengumpulkan sekitar 100 perusahaan dan lembaga terkait untuk mempromosikan peluang kerja yang inklusif dan setara bagi para penyandang disabilitas.

Melalui acara virtual bertajuk "Unlock the Untapped Market: Differently Abled People" pada Desember 2020, dua perusahaan

mempresentasikan program inklusif mereka dan manfaat yang diperoleh dengan mempekerjakan penyandang disabilitas. Acara ini juga memperkenalkan inisiatif bersama Difalink dan Yayasan Peduli Anak Spesial, dengan dukungan dari ILO, untuk menghubungkan perusahaan dengan penyandang disabilitas, termasuk disabilitas yang tidak kasat mata dalam bentuk kesulitan belajar. Selengkapnya: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_764866/lang-en/index.htm



Mendukung Upaya Digitalisasi Aksara Nusantara

Indonesia memiliki 718 bahasa yang digunakan di penjuru nusantara, tetapi sebagian besar tidak memiliki kehadiran daring yang substansial selain bahasa nasional Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, UNESCO mendukung Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dalam inisiatif "Merajut Indonesia melalui Digitalisasi Aksara Nusantara" untuk melestarikan aksara nusantara dan menjadikannya sebagai skrip yang banyak tersedia secara daring dan di berbagai platform digital. Sejak tahun 2003, UNESCO telah mengadopsi Rekomendasi mengenai Promosi dan Penggunaan

Multilingualisme dan Akses Universal ke Ranah Siber yang mendorong semua negara untuk mengembangkan konten dan sistem multibahasa dan untuk memfasilitasi akses ke beragam jaringan dan sistem. Memastikan keragaman bahasa lokal agar tersedia secara daring mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama Tujuan 16 tentang akses ke informasi. Cek situs Merajut Indonesia di merajut.id dan berita selengkapnya di sini: <https://en.unesco.org/news/making-indonesian-indigenous-language-scripts-available-online>

Bergabung untuk Mendorong Industri Telemedik di Indonesia



Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Aliansi Telemedik Indonesia (ATENSI), sebuah platform yang terdiri dari 28 aplikasi digital terkait kesehatan, pada Desember 2020 menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk meningkatkan industri telemedik di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Di bawah MOU ini, UNDP dan ATENSI akan bekerja

sama untuk mendapatkan data dan informasi yang diverifikasi dan mengadvokasi layanan tersebut. Informasi tersebut akan meletakkan dasar untuk membangun ekosistem regulasi yang sangat dibutuhkan agar telemedik berkembang. Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen UNDP untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan meningkatkan ketahanan sektor kesehatan dan sejalan dengan prioritas bersama Pemerintah Indonesia dan UNDP untuk memperjuangkan inovasi dan teknologi digital untuk pencapaian Agenda 2030. Pelajari lebih lanjut tentang kemitraan ini: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2020/UNDP-and-ATENSI.html>